



Keywords:

Geografi Sumberdaya Alam, Sumber Belajar, Kontekstual, *Co-Management*, Hutan

Corresponding Author:

Dwi Fauzia Putra
dwifauziaputra@unikama.ac.id

ISSN (print): 1858-4985
ISSN (on-line): 2721-8821

Model Kerjasama (*CO-management*) Pengelolaan Hutan Desa Giripurno Kota Batu sebagai Sumber Belajar Kontekstual Geografi Sumberdaya Alam

Dwi Fauzia Putra^{1*}, Agung Suprianto¹, Nila Restu Wardani¹

¹Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Malang 65148, Indonesia
Email : *dwifauziaputra@unikama.ac.id, agung@unikama.ac.id, nilarestu@unikama.ac.id

Abstract

Sumber belajar kontekstual perlu digali dari wilayah sekitar mahasiswa guna mewujudkan pembelajaran bermakna mata kuliah Geografi Sumberdaya Alam. Salahsatu studi kasus pengelolaan sumberdaya alam adalah pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani dan LMDH Desa Giripurno. Tujuan penelitian untuk mengkaji dinamika pengelolaan hutan menuju *co-management*, model kerjasama dalam *co-management*, selanjutnya diakhiri dengan mengintegrasikan temuan tersebut sebagai sumber belajar kontekstual pada mata kuliah Geografi Sumberdaya Alam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan dan analisis data. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive-snowball sampling* meliputi pihak Perum Perhutani, Pihak LMDH, dan petani hutan. Data sekunder digunakan untuk mendukung temuan lapangan. Analisis data dengan mengelompokkan data kedalam kategori dan selanjutnya disusun berdasarkan tema sesuai tujuan penelitian. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Dinamika pengelolaan hutan Desa Giripurno Kota Batu melalui tiga periode besar orde lama, orde baru, dan reformasi dimana titik balik diterapkannya PHBM adalah kurangnya keterlibatan masyarakat. Model *co-management* PHBM dilakukan melalui kemitraan sejajar antara Perum Perhutani, LMDH dan pihak lain yang berkepentingan untuk mencapai kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Integrasi temuan ke dalam mata kuliah bahwa temuan penelitian dapat dijadikan sumber belajar kontekstual dengan melihat kesesuaiannya dengan CPMK, Sub-CPMK, dan indikator capaian pembelajaran mata kuliah Geografi Sumberdaya

1. PENDAHULUAN

Geografi mempelajari hubungan timbal balik antara manusia atau sekelompok manusia dengan alam dalam ruang. Interaksi antara manusia dengan alam dapat terwujud dalam pengelolaan sumberdaya alam. Keterkaitan antara manusia dengan alam mempunyai dua arah, manusia dipengaruhi oleh alam atau manusia mempunyai kemampuan untuk mengubah alam tersebut (Bintarto & Hadisumarmo, 1987; Yunus, 2010).

Mata kuliah Geografi Sumberdaya Alam merupakan salahsatu mata kuliah Program Studi Pendidikan Geografi Universtas Kanjuruhan Malang. Mata kuliah ini mengkaji konsep sumber daya alam, keragaman dan implikasinya, sebaran sumber daya alam, permasalahan sumber daya alam, konservasi sumber daya alam, prinsip-prinsip keberlanjutan dan implikasinya terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Ini berarti sumberdaya alam dikaji dari segi ruang, relasi timbal baliknya dengan fenomena geosfer lainnya, serta kompleksitas wilayah.

Salahsatu Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) ini adalah mampu menganalisis permasalahan sumber daya kehutanan dan sebarannya di Indonesia serta contoh pengelolaannya secara

kontekstual berbasis karakteristik wilayah. Selama ini sumber belajar diperoleh dari buku, jurnal, dan info grafis yang belum kontekstual. Sumber belajar belum banyak menyajikan kajian pengelolaan sumberdaya hutan yang kontekstual di wilayah sekitar mahasiswa belajar. Oleh karena itu perlu digali sumber belajar yang diperoleh dari wilayah sekitar mahasiswa guna menunjang capaian pembelajaran tersebut.

Pemahaman tentang relasi antara pengelolaan dengan eksistensi hutan mutlak dibutuhkan. Pengelolaan hutan dari waktu ke waktu penting diperhatikan karena hubungannya dengan kerusakan hutan (FAO, 2015). Pengelolaan yang baik tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan negara namun juga harus mampu menjaga hutan dari kerusakan (Youn dkk, 2017). Salah satu contoh studi kasus pengelolaan hutan adalah yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan LMDH Desa Giripurno Kota Batu melalui *Co-management* dalam skema program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Masyarakat yang terlibat diwadahi dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) "*Wana Tani*" Giripurno. Mereka yang berpartisipasi selanjutnya disebut dengan istilah "*Pesanggem*".

Berlandaskan pada apa yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji fenomena ini dari sudut pandang pembelajaran sehingga dapat dijadikan sebagai sumber belajar Geografi Sumberdaya Alam Sub-CPMK Pengelolaan sumberdaya hutan kontekstual. Tujuan selanjutnya dirinci diawali dari kajian terhadap dinamika pengelolaan hutan menuju *co-management*, model kerjasama dalam *co-management* antar pihak yang terlibat, selanjutnya diakhiri dengan mengintegrasikan temuan tersebut sebagai sumber belajar kontekstual pada mata kuliah Geografi Sumberdaya Alam.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan hutan bersama. Wawancara untuk mengetahui dinamika dan model kerjasama (*co-management*) dalam mengelola hutan.

Pemilihan informan dilakukn dengan menggunakan teknik *purposive-snowball sampling* maka ditentukan informan meliputi pihak Perum Perhutani, Pihak LMDH, dan petani hutan. Rincian informan meliputi ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Selanjutnya dari ketua LMDH ini diperoleh partisipan dari pihak petani sejumlah 10 orang dan dari pihak Perhutani sejumlah 2 orang yaitu ketua seksi PHBM dan bidang pembuatan tanaman hutan. Data sekunder digunakan untuk mendukung temuan lapangan. Analisis data menggunakan model analisis interaktif melalui pengelompokan data kedalam kategori dan selanjutnya disusun berdasarkan tema sesuai tujuan penelitian. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Wilayah Desa Giripurno.

Wilayah Giripurno didominasi oleh kawasan hutan dengan topografi berupa perbukitan. Kondisi geografis ini menjadikan wilayah ini potensial untuk pertanian. Hal ini juga menjadikan sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani. Jenis pertanian didominasi oleh tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, palawija, dan tanaman pangan.

Sebagian besar penggunaan lahan didominasi untuk pertanian didominasi oleh perkebunan tanaman apel dan alpukat pada sektor perkebunan. Tanaman sayur didominasi oleh bawang merah dan bawang putih. Sedangkan pada jenis tanaman pangan didominasi oleh tanaman padi dan jagung. Selain potensi pertanian terdapat juga potensi peternakan di Desa Giripurno meliputi jenis sapi, kambing, unggas dan kelinci. Peternakan Ayam merupakan jenis yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Jenis peternakan lainnya adalah kambing dan sapi yang juga banyak dibudidayakan oleh masyarakat.

Kondisi sosial ekonomi dan kependudukan Desa Giripurno dilihat dari Jumlah penduduk Desa Giripurno adalah 10.198 jiwa dengan 2.746 kepala keluarga dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.013 Jiwa/Km². Berdasarkan jenis kelaminnya penduduk laki-laki sejumlah 5.100 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 5.098 jiwa. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif berimbang. Keseluruhan penduduk merupakan warga pribumi yang sebagian besar beragama Islam dan sebagian kecil lainnya beragama kristen dan katolik. Sebagian besar jumlah penduduk yang berusia antara di atas 15 tahun hingga 60 tahun. Ini menunjukkan bahwa usia produktif mendominasi populasi penduduk di Desa giripurno. Selain itu penduduk lainnya merupakan penduduk usia 0 hingga 1 tahun dan diatas 60 tahun atau usia tidak produktif (Profil Desa Giripurno, 2016).

Berdasarkan tingkat pendidikannya bahwa kualitas sumberdaya manusia masih menjadi permasalahan di Desa ini. ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang didominasi oleh tamatan SD dan SLTP. Ini belum lagi mereka yang tidak tamat SD. Disisi lain proporsi lulusan pendidikan tinggi hanya sebagian kecil dari total jumlah penduduk.

Selain kondisi sosial yang telah dipaparkan, karakteristik kegiatan ekonomi masyarakat Desa Giripurno menunjukkan bahwa karakteristik ekonomi masyarakat Desa Giripurno berkisar pada aktivitas ekonomi pertanian, peternakan, dan jasa. aktivitas pertanian berupa petani pemilik, penyewa, dan buruh tani. Aktivitas peternakan berupa ternak sapi, kambing, ayam, dan buruh ternak. Sedangkan sektor jasa lebih bervariasi.

Dinamika Pengelolaan Sumberdaya Hutan Desa Giripurno Menuju *Co-management*

Dinamika pengelolaan hutan Desa Giripurno Kota Batu melalui tiga periode besar yakni masa orde lama, orde baru, dan reformasi. Saat ini, masyarakat diwadahi melalui LMDH dalam pengelolaan hutan. Informan mengungkapkan bahwa salah satu faktor dibentuknya LMDH adalah instruksi dari Perhutani menanggapi fenomena kerusakan hutan setelah era reformasi. Kerusakan hutan saat itu memicu kerjasama antara perhutani dan masyarakat dalam mengelola hutan sebagai solusi bagi semua pihak. Ia mengatakan bahwa:

”Dari perhutani termasuk dari undang-undang yang berlangsung bahwa setelah reformasi akhine timbul aturan pengelolaan hutan bersama masyarakat jadi ya kita pada saat itu ibarate harus membentuk lembaga yang namanya LMDH setelah itu koordinasi dengan perhutani terus terbentuk LMDH di SK kan ke desa setelah itu ada MOU dari pemerintahan” (W/LMDH/SJ)

Ini juga yang diungkapkan oleh Informan lain dari pihak Perhutani bahwa:

”PHBM awalnya gini kondisi masyarakat kondisi kawasan hutan abis penjarahan itu kan akhirnya dimunculkanlah PHBM jadi biar disitu kan di PHBM ada jiwa beragi” (W/PHT/KSN)

Selain pemaparan dari informan, berikut disajikan tabel dinamika pengelolaan hutan dari masa ke masa.

Tabel 1. Dinamika pengelolaan hutan menuju *Co-management*

Periode	UU	Bentuk Pegelolaan
Orde Lama (1945 – 1965)	Undang-undang kehutanan awal kemerdekaan Boschordonantie 1927.	Ordonansi Hutan dikelola oleh Jawatan Kehutanan yang dibentuk sejak kolonoal Belanda diteruskan Jepang dan selanjutnya pemerintah Indonesia.
Orde Baru (1966 – 1998)	Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) Nomor 5 Tahun 1967	Prioritas utama pada kebutuhan modal pembangunan, penanaman modal asing dan dalam negeri, Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).
Reformasi (1998 – 2006)	Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999.	Desentralisasi melalui otonomi daerah namun masih cenderung sentralistik atau top-down.
	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007	Dibentuk kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

2001 - Saat Ini	UU No. 41/1999 SK Dewan Pengawas Perum Perhutani No: 136/KPTS/DIR/2001	Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
-----------------	--	---

(Sumber: Hidayat, 2015; KEMNLHK. 2012; Prakosa, 1996)

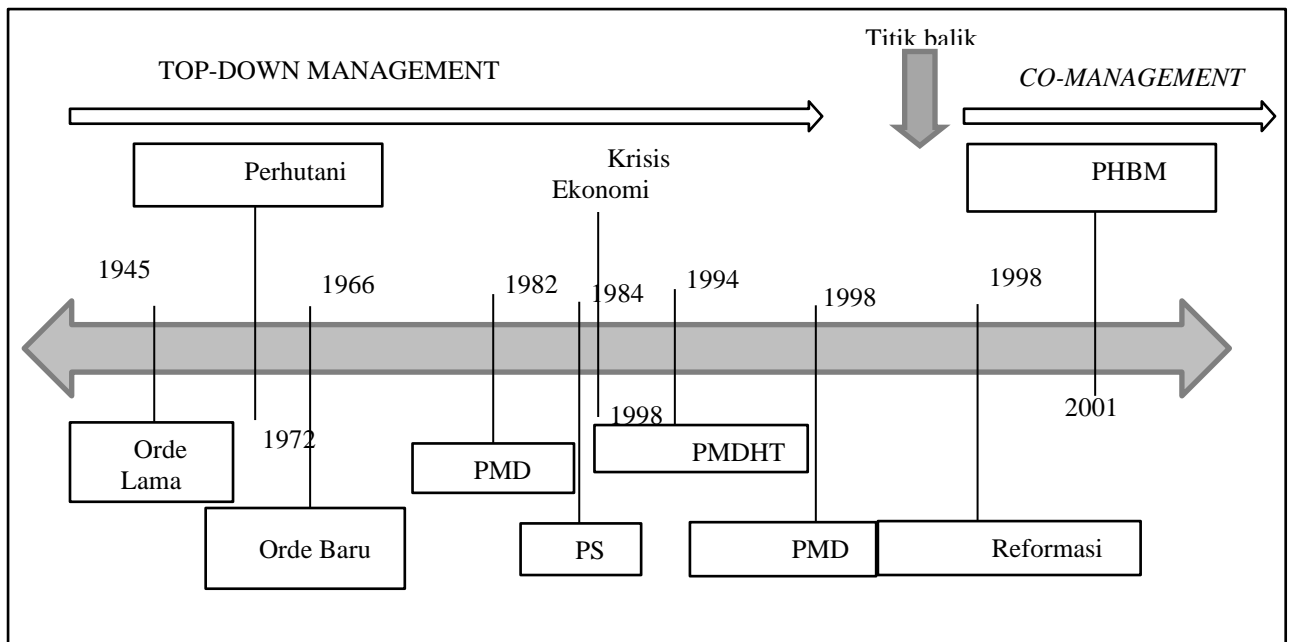
Tabel di atas menunjukkan bahwa berbagai bentuk pengelolaan hutan telah dilakukan dari masa ke masa. Program PHBM sebagai bentuk terkini pengelolaan hutan. PHBM dijalankan oleh Perum Perhutani bersama dengan masyarakat desa hutan Giripurno. Perum Perhutani sebagai badan usaha milik negara dalam mengelola hutan telah melakukan berbagai program pengelolaan hutan. program-program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani

Tahun	Jenis Program	Bentuk kegiatan
1972	Perubahan pengelolaan dari Security Approach Ke Prosperity Approach (Pendekatan Keamanan ke Pendekatan Kesejahteraan)	Kegiatan subsidi saprotan & sarana air bersih, program Mantri-Lurah
1982	Pembangunan Masyarakat Desa (PMD)	Pembuatan Sarana Prasarana Bio Fisik yang bersifat Bantuan
1984	Perhutanan Sosial (PS)	kegiatan pembentukan KTH, Agroforestry dan Usaha produktif.
1994	Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu (PMDHT)	Perhutanan Sosial sebagai salah satu komponen Pembangunan Wilayah di bawah Koordinasi Pemda dengan Lembaga Masyarakat yang Mengakar dan Mandiri (LM3) dan Koperasi Pondok Pesantren
1998	Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)	Melalui PHBM Perhutani melakukan pemberdayaan masyarakat desa hutan sebagai kerangka dari Perhutanan Sosial dengan prinsip bersama, berdaya, berbagi dan transparan.
2001 – Sekarang	Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)	Pembentukan lembaga yang disebut Lembaga Masyarakat Desa hutan (LMDH) di tingkat desa yang mengikat seluruh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang ada di desa untuk bekerjasama dengan Perum Perhutani.

(Sumber: Perhutani, 2016)

Berikut disajikan gambar *timeline* titik balik pengelolaan hutan menuju pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) atau *Co-management*.



Gambar 1. *Timeline* sejarah PHBM (Sumber: Hasil Analisis Data, 2021)

Keterangan:

PMD = Pemberdayaan Masyarakat Desa

PS = Perhutanan Sosial

PMDHT = Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu

PMDH = Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan

PHBM = Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Gambar di atas menunjukkan bahwa titik balik diterapkannya PHBM adalah kurangnya keterlibatan masyarakat pada sistem di masa sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara informan Perhutani diungkapkan bahwa:

”Kalau dulu ada namun hanya melibatkan sedikit atau perwakilan masyarakat saja. Sekarang justru perhutani cenderung merangkul masyarakat, LMDH nya yang dirangkul lembaganya disitu nanti kan lembaganya dapat sharing maka disitu LMDH nya dilibatkan.... jadi kerjasamanya sudah memang jadi satu paket sekarang degan LMDH” (W/PHT/DD)

Ini bermakna bahwa sistem sebelumnya memang telah melibatkan masyarakat, namun tidak secara keseluruhan masyarakat desa hutan. Kondisi seperti ini memang tidak menimbulkan masalah dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang perlu melibatkan masyarakat secara keseluruhan terutama bagi mereka yang menggantungkan kehidupannya pada akses terhadap hutan.

Model Kerjasama (*CO-management*) dalam Pengelolaan Hutan Desa Giripurno Kota Batu

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Giripurno merupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Perum Perhutani bersama masyarakat desa hutan dengan jiwa berbagi untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan secara optimal (Surat Perjanjian Kerjasama antara Perum Perhutani KPH Malang dengan LMDH Giripurno, 2004). Tujuan utama dari semua itu adalah untuk mewujudkan hutan yang lestari dan masyarakat yang sejahtera. Informan KSS PHBM KPH Malang menjelaskan ini dengan mengatakan:

”Tujuan PHBM membuat hutan lestari dan masyarakat sejahtera” (W/PHT/KSN)

Guna mewujudkan keberhasilan Program PHBM setiap desa yang bekerjasama diwajibkan membentuk lembaga masyarakat desa hutan. Kewajiban ini termasuk di Desa Giripurno dengan membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Tani yang telah berbadan hukum sebagai mitra kerjasama dengan Perum Perhutani dalam mengelola hutan dibawah skema PHBM. LMDH di Desa Giripurno dibentuk tahun 2004 sebagai usaha untuk mendapatkan akses ke hutan. Informan ketua LMDH menjelaskan ini dengan mengatakan:

.”LMDH itu pertama awalnya memang iki ibarate awal dulu ya mas intine sebelum tahun 2004, 1998 kan penjarahan, setelah penjarahan hutan banyak yang gundul karena banyak ditebangi akhirnya ditutup pada saat itu sekitar tahun 2001. Setelah itu timbul di Perhutani kebijakan yang intinya harus membentuk lembaga LMDH untuk mengelola hutan bersama masyarakat sebagai pelindung masyarakat ya untuk perpanjangan tangan juga dari perhutani. Setelah itu di Giripurno mas mulai terbentuk penandatanganan akta notaris tahun 2004, akhirnya setelah terbentuk hutan boleh dibuka kembali tetapi lewat LMDH” (W/LMDH/SJ)

LMDH ini merupakan lembaga masyarakat desa hutan yang dibentuk untuk menyikapi program pengelolaan hutan bersama oleh Perum Perhutani. Lembaga ini mewedahi masyarakat desa hutan dalam kerjasama mengelola hutan. Hal ini dikarenakan Perhutani tidak ingin bekerjasama dengan individu namun dengan masyarakat sehingga perlu wadah yang menjembatani. LMDH ini sebagai implementasi PHBM di lapangan. LMDH dibentuk oleh Pemerintah Desa, Masyarakat, Perum Perhutani, dan Walikota. Setelah terbentuk LMDH di Desa Giripurno bekerjasama dengan Perhutani untuk mengelola kawasan hutan yang ada di wilayah administratifnya atau dikenal dengan istilah *wengkon*. Alur pembentukan LMDH adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi profil desa dan potensi desa hutan dengan metode pendekatan secara partisipatif
2. Sosialisasi kelompok Masyarakat Desa Hutan
3. Pemantapan LMDH, Penjelasan AD/ART
4. Pembentukan LMDH melalui rembung desa. LMDH tersebut harus di Akte Notariskan
5. Mendorong LMDH untuk be Badan Hukum Koperasi
(Perhutani, 2010)

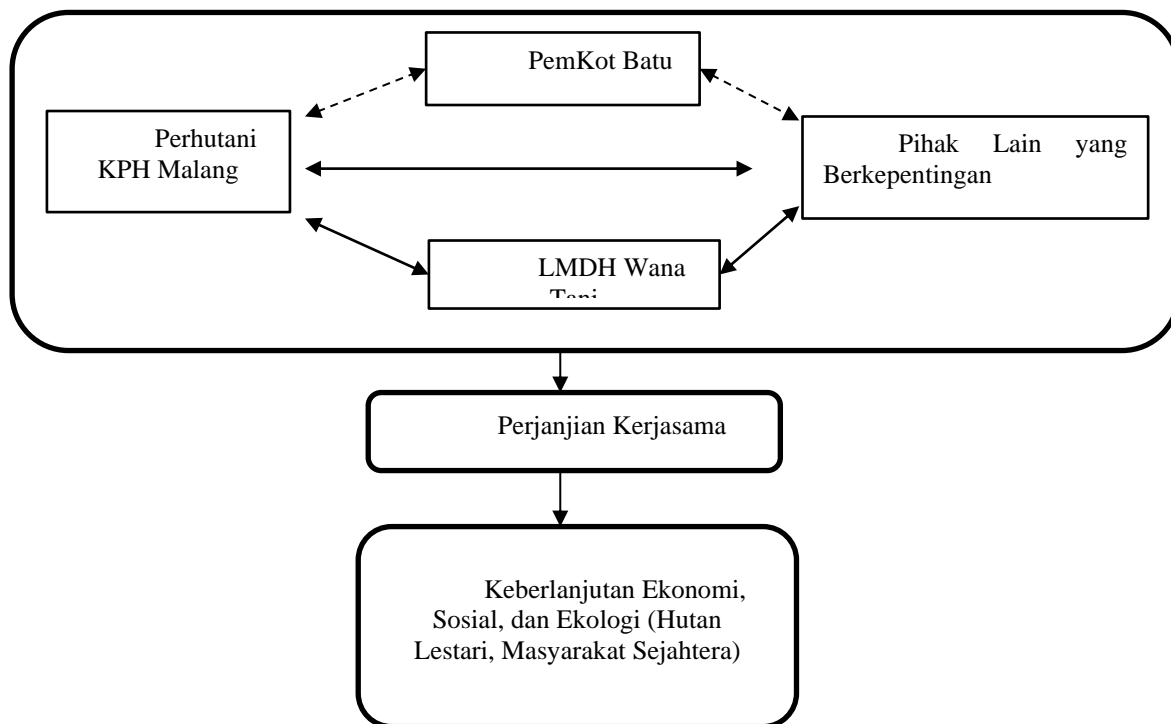
LMDH Desa Giripurno ini pada awal dibentuknya tahun 2004 diketuai oleh Almarhun Bapak Warisan dan Bapak Saji sebagai wakilnya. Namun setelah Bapak Warisan meninggal dunia, LMDH dipimpin oleh Bapak Saji yang ditunjuk oleh anggota sebagai ketua hingga sekarang.

Anggota LMDH adalah masyarakat hutan yang atau disebut dengan istilah *Pesanggem*, yaitu masyarakat Desa Giripurno yang hidup berbatasan dengan hutan yang bekerjasama dengan Perhutani dalam mengelola hutan. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan sebesar 435 kepala keluarga. Rata-rata tingkat pendidikannya adalah sekolah dasar. Keseluruhan pesanggem bekerja pada sektor pertanian.

Anggota LMDH dalam kerjasama dengan Perhutani selanjutnya diikat oleh perjanjian Kerjasama (PKS) antara Perum Perhutani KPH Malang dengan LMDH Giripurno. PKS berisi aturan-aturan yang menjelaskan tentang mekanisme PHBM. Aturan ini berisi ketentuan-ketentuan teknik pembuatan tanaman, Hak dan Kewajiban, ketentuan bagi hasil hutan, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan sumberdaya hutan.

Luas hutan yang menjadi objek kerjasama Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Giripurno adalah 459,6 Ha meliputi hutan produksi 244 Ha dan hutan lindung 215 Ha. Topografi hutan berupa perbukitan dengan ketinggian 600-700 Mdpl di lereng Gunung Arjuno. Masyarakat desa hutan Pesanggem yang terlibat dalam pengelolaan hutan sebesar 435 kepala keluarga. Rata-rata tingkat pendidikan Pesanggem adalah sekolah dasar. Keseluruhan pesanggem bekerja pada sektor pertanian. Mereka diwadahi dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Tani dan diikat dengan perjanjian kerjasama (MoU) antara Perum Perhutani dan LMDH (Perjanjian Kerjasama antara Perum Perhutani KPH Malang dengan LMDH Giripurno, 2004).

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dideskripsikan selanjutnya disusun model hubungan kerjasama antar stakeholder dengan pola kemitraan sejajar dalam program pengelolaan hutan bersama sebagai berikut.



Gambar 2. Model Kerjasama (*CO-management*) dalam Pengelolaan Hutan Desa Giripurno Kota Batu (Sumber: Hasil Analisis Data, 2021)

Model di atas menunjukkan pihak yang bekerjasama dalam *Co-management* PHBM, yaitu Perum Perhutani, LMDH dan pihak lain yang berkepentingan diantaranya pemerintah, LSM, lembaga sosial masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga donor dan usaha swasta). Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang bekerjasama dalam pengelolaan hutan diutamakan yang telah berbadan hukum, dan direkomendasikan serta diajukan oleh Pemerintah Desa dengan surat permohonan kerjasama kepada Perum Perhutani. Pihak lain yang berkepentingan, dapat berperan langsung sebagai investor maupun tidak langsung sebagai motivator, dinamisator atau fasilitator untuk bekerjasama dalam kegiatan PHBM. Tujuan akhir adalah mewujudkan hutan yang lestari dan masyarakat yang sejahtera atau kelestarian dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi dalam pengelolaan hutan. Model pengelolaan hutan bersama menjadi berkontribusi dalam pelestarian hutan (Kumsap dan Indanon, 2016) serta mensejahterakan masyarakat (Ming'ate dkk, 2014). Hal tersebut dicapai melalui partisipasi berbagai pihak (Sukmawati, Utaya, & Susilo, 2015).

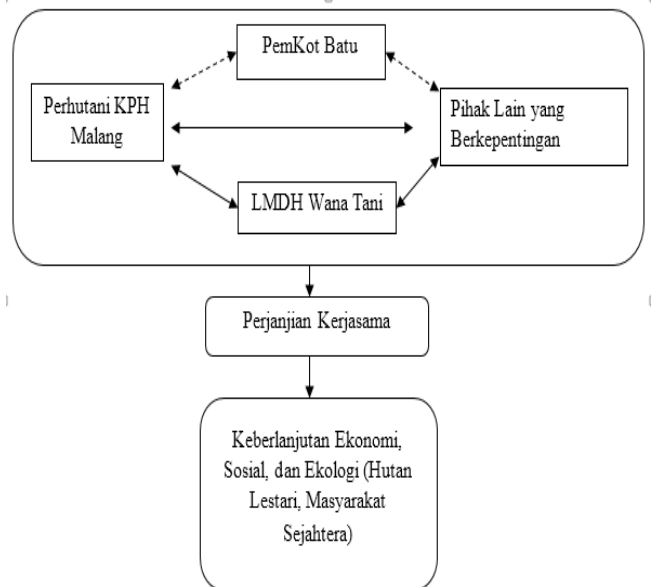
Integrasi Model Kerjasama (*CO-Management*) dalam Pengelolaan Hutan Desa Giripurno Kota Batu Sebagai Sumber Belajar Geografi Sumberdaya Alam

Berdasarkan hasil kajian terhadap studi kasus PHBM Desa Giripurno Kota Batu maka integrasi model kerjasama (*co-management*) dalam pengelolaan hutan Desa Giripurno Kota Batu sebagai sumber belajar geografi sumberdaya alam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Integrasi Model Kerjasama (*CO-Management*) dalam Pengelolaan Hutan Desa Giripurno Kota Batu Sebagai Sumber Belajar Geografi Sumberdaya Alam

CPMK	Sub-CPMK	Indikator	Sumber Belajar Kontekstual
Mampu menganalisis permasalahan sumber daya kehutanan dan	Mampu menganalisis permasalahan sumber daya kehutanan dan	1. Mampu menjelaskan karakteristik wilayah pengelolaan	Karakteristik wilayah desa Giripurno: 1. Kondisi geografis 2. Kondisi sosial ekonomi 3. Kondisi sosial budaya 4. Kondisi demografis

CPMK	Sub-CPMK	Indikator	Sumber Belajar Kontekstual
sebarannya di Indonesia serta contoh pengelolaannya secara kontekstual berbasis karakteristik wilayah	sebarannya di Indonesia serta contoh pengelolaannya secara kontekstual berbasis karakteristik wilayah	<p>sumberdaya hutan</p> <p>2. Mampu menganalisis dinamika pengelolaan sumberdaya hutan menuju <i>co-management</i></p> <p>3. Mampu menyusun kerangka konseptual <i>co-management</i> dalam pengelolaan sumberdaya hutan</p>	<p>1. Dinamika pengeolaan hutan menuju <i>co-management</i> PHBM</p> <p>2. Dinamika pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani menuju PHBM</p> <p>3. <i>Timeline</i> pengelolaan hutan menuju <i>co-management</i> PHBM</p> <p>Model Kerjasama (<i>CO-management</i>) dalam Pengelolaan Hutan Desa Giripurno Kota Batu</p>



(Sumber: Hasil Analisis Data, 2021)

Tabel di atas menunjukkan keterkaitan antara hasil penelitian dengan mata kuliah geografi sumberdaya alam yang merupakan salahsatu mata kuliah Program Studi Pendidikan Geografi Universtas Kanjuruhan Malang. Keterkaitannya bahwa temuan penelitian dapat dijadikan sumber belajar karena sesuai dengan CPMK, Sub-CPMK, dan Indikatornya. Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya bahwa melalui berbagai bentuk sumber belajar yang diperoleh dari konteks lokal dapat dijadikan sumber belajar geografi (Al Musafiri, Utaya, & Astina, 2016; Mau, Susilo, Ruja, 2019). Selain itu sumber belajar yang ditemukan merupakan hasil penelitian yang digali dari wilayah sekitar mahasiswa belajar, hal ini memenuhi tuntutan kurikulum program studi yang menekankan pembelajaran bermakna, kontekstual berbasis karakteristik wilayah. Keunggulan pembelajaran yang menggunakan sumber belajar kontekstual lebih mampu membantu dalam pemahaman konsep bidang geografi (Barona, 2015).

4. KESIMPULAN

Dinamika pengelolaan hutan Desa Giripurno Kota Batu melalui tiga periode besar yakni masa orde lama, orde baru, dan reformasi. Program PHBM sebagai bentuk terkini pengelolaan hutan dijalankan oleh Perum Perhutani bersama dengan masyarakat desa hutan Giripurno. Perum Perhutani sebagai badan usaha milik negara dalam mengelola hutan telah melakukan berbagai program pengelolaan hutan. Titik balik diterapkannya PHBM adalah kurangnya keterlibatan masyarakat pada sistem di masa sebelumnya. Model kerjasama dalam *Co-management* PHBM dilakukan oleh pihak-pihak terkait yaitu Perum Perhutani, LMDH dan pihak lain yang berkepentingan diantaranya pemerintah, LSM, lembaga sosial masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga donor dan usaha swasta). Tujuan akhir adalah mewujudkan

hutan yang lestari dan masyarakat yang sejahtera atau kelestarian dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi dalam pengelolaan hutan. Keterkaitan antara hasil penelitian dengan mata kuliah geografi sumberdaya alam yang merupakan salahsatu mata kuliah Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Kanjuruhan Malang bahwa temuan penelitian dapat dijadikan sumber belajar karena sesuai dengan CPMK, Sub-CPMK, dan Indikatornya. Sumber belajar ini memenuhi tuntutan kurikulum program studi yang menekankan pembelajaran bermakna, kontekstual berbasis karakteristik wilayah dimana keunggulan pembelajaran yang menggunakan sumber belajar kontekstual lebih mampu membantu dalam pemahaman konsep bidang geografi. Berdasarkan hasil penelitian disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggali berbagai fenomena di sekitar mahasiswa untuk dikembangkan sebagai sumber belajar. Eksperimen disarankan untuk mengetahui pengaruh sumber belajar yang telah disusun.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Al Musafiri, M. R., Utaya, S., & Astina, I. K. (2016). Potensi kearifan lokal suku using sebagai sumber belajar Geografi SMA di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 1(10), 2040-2046
- Barona, C. S. (2015). *PENGARUH PENGGUNAAN RUMOH ACEH SEBAGAI SUMBER BELAJAR GEOGRAFI TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MITIGASI BENCANA: Studi Eksperimen di SMAN 1 Peusangan Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia)
- Bintarto, R. & Hadisumarmo, S. 1987. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta: Lp3es
- Fao. 2015. *Global Forest Resources Assessment 2015: How Have the World's Forests*
- Hidayat, H. 2015. *Pengelolaan Hutan Lestari*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- KEMNLHK. 2012. *Media Informasi KPH Kesatuan Pengelolaan Hutan: Sejarah Pengelolaan Hutan*. Online: [Http://Kph.Menlhk.Go.Id](http://Kph.Menlhk.Go.Id). Diakses Januari, 2017
- Kumsap, K. & Indanon, R. 2016. Integration of Community Forest Management and Development Activities: Lessons Learned from Ubon Ratchathani Province. *Kasetsart Journal of Social Sciences* (2016) 1-6.
- Mau, M. H., Susilo, S., & Ruja, I. N. (2019). Kearifan Lokal Upacara An Tama Masyarakat Adat Loona sebagai Sumber Belajar Geografi. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 4(9), 1202-1206
- Ming'ate, F. L. M., Hamish, G., & Rennie, A. M., 2014. Potential for Co-Management Approaches to Strengthen Livelihoods of Forest Dependent Communities: A Kenyan Case. *Land Use Polic* 41 (2014) 304-312.
- Perhutani. 2010. *Pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat*
- Perhutani. 2016. *PHBM*. [Http://Www.Bumn.Go.Id/Perhutani/Halaman/159](http://Www.Bumn.Go.Id/Perhutani/Halaman/159)
- Prakosa, M, 1996. *Renjana Kebijakan Kehutanan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Profil Desa Giripurno. 2016
- Sukmawati, Utaya, S., & Susilo, S. 2015. Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Pelestarian Hutan sebagai Sumber Belajar Geografi. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, Hal 202–208
- Surat Perjanjian Perum Perhutani KPH Malang dengan Masyarakat Desa Hutan Kota Batu. 2004
- Youn, Yeo-Chang, Junyeong Choi, Wil De Jong, Jinlong Liu, Mi Sun Park, Leni D. Camacho, Satoshi Tachibana, Nguyen Din Huudung, Padam Parkash Bhojvaid, Ellyn K. Damayanti, Phongxiong Wanneng, Mohd Shawahid Othman. 2017. Conditions of Forest Transition in Asian Countries. *Forest Policy and Economics* 76 (2017) 14-24
- Yunus, H.S. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar